

Katalog : 7102012.1204

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TAPANULI TENGAH 2016



<https://tapanulitenangah.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Katalog : 7102012.1204

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TAPANULI TENGAH 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

IKK KABUPATEN TAPANULI TENGAH

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN 2016

ISBN : 978-602-5499-16-6
Nomor Publikasi : 1204.1726
Katalog BPS : 7102012.1204
Ukuran Buku : 28 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : viii + 42 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah

Gambar Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah

Ilustrasi Kover:

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

Dicetak oleh

CV RILIS GRAFIKA (November 2017)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum : Alzen, S.Si., M.Si

Penanggungjawab Teknis : Gusli Tanjung, SE

Penyusun : Vicera Romindo Toga Torop, SST

Editor : Juhar Monang S. Tambun, SST

Koordinator Gambar

dan Tata Letak : Juhar Monang S. Tambun, SST

Gambar Kulit : Juhar Monang S. Tambun, SST

Tata Letak : Juhar Monang S. Tambun, SST

<https://tapanuitengh.kab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Kebutuhan akan data yang akurat, objektif tanpa rekayasa, serta terkini dewasa ini semakin diminati dan ditunggu-tunggu, tidak terbatas hanya pada instansi pemerintah dan pengambil kebijakan, namun telah merambah hingga pada masyarakat luas. Sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), Indikator Kemahalan Konstruksi yang dihitung berdasarkan letak geografis menjadi data yang ditunggu kehadirannya. Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 berguna memberikan data yang akurat dimaksud, khususnya untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat kemahalan konstruksi yang dibedakan menjadi 5 jenis bangunan, yaitu: (1) bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; (2) bangunan untuk prasarana pertanian; (3) bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan; (4) bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; dan (5) bangunan lainnya.

Informasi di atas tentunya sangat dibutuhkan secara berkesinambungan, baik pemerintah, peneliti, maupun dunia usaha. Untuk memenuhi kebutuhan data yang semakin beragam tersebut, BPS Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya untuk menyusun publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam hal penyediaan data dan penyusunan publikasi ini. Kami berharap kritik dan saran guna perbaikan publikasi di masa mendatang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen data.

Pandan, Oktober 2017
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala,



Alzen, S.Si, M.Si
NIP 19611117 198303 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Konsep Pemikiran	3
1.3. Metode Penghitungan	5
1 4. IKK 2016	11
BAB II PEMBAHASAN	13
2.1. Gambaran Umum	14
2.2 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016	17
2.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016	22

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Perbedaan IKK dan IHPB	15
Tabel	2.2	Perbandingan Antara IKK 2008 – IKK 2016.....	16
Tabel	2.3	IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan Kota Acuan Tahun 2015 dan 2016.....	17
Tabel	2.4	IKK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta Ranking dalam Provinsi Tahun 2015 dan 2016.....	19
Tabel	2.5	IKK Kemahalan Konstruksi Provinsi di Indonesia Tahun 2016.....	23

DAFTAR GRAFIK

		Halaman	
Grafik	2.1	IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Acuan Tahun 2015-2016.....	18
Grafik	2.2	Perbandingan Nilai IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015-2016.....	22
Grafik	2.3	IKK Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Acuan Tahun 2015-2016.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Gambar Bahan Bangunan dan Alat Berat Konstruksi yang Digunakan sebagai Paket Komoditas Penghitungan IKK 2016	25
Lampiran 2 Kuesioner yang Digunakan dalam Pencacahan IKK 2016	31

<https://tapanulitengahkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cita-cita yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan Pembangunan Nasional secara merata dan adil di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Sejak tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tentang Otonomi Daerah (Otda) untuk mendorong percepatan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil, merata, efektif serta efisien. Sejak dikeluarkannya kebijakan Pemerintah tentang Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan pembangunan tersebut tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan data hingga level/tingkat kabupaten/kota sebagai indikator pembangunan.

Kebijakan Otonomi Daerah ini selain dapat mendorong percepatan pembangunan juga diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan horizontal antar daerah dengan tujuan utamanya adalah sebagai pemerataan keuangan antar daerah. Dengan harapan, kebijakan Otonomi Daerah dapat mempercepat pembangunan daerah-daerah yang masih tertinggal dan terbelakang, baik dalam kemampuan keuangan maupun pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alamnya. Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, kepala daerah diberi kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan merata.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah di daerah perlu didukung dengan penyediaan statistik yang dapat mencerminkan kebutuhan daerah dan harus memenuhi kriteria: a) mempunyai kredibilitas tinggi; b) mutakhir; dan c) mempunyai validitas dan akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU di suatu kabupaten/kota adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota yang merupakan pendekatan terhadap keadaan geografis suatu wilayah. IKK pertama kali dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang.

1.2 Konsep Pemikiran

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal, seperti IHPB atau IHK, dimana indeks periodikal merupakan angka indeks yang menggambarkan perkembangan harga di

suatu lokasi pada periode tertentu terhadap harga tahun dasar. Sejak tahun 2005 dalam penyajian IKK diperhitungkan pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga periode dasar yaitu Februari 2004 (sesuai dasar penghitungan IKK 2004).

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yaitu dengan pendekatan harga *input* dan pendekatan harga *output*. Pendekatan harga *input* yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan *output* dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Kelemahan metode harga *output* adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan, maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga *input* tetapi di bawah harga *output* karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah kemudian mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

Dengan digunakannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pembentukan Modal Tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka IKK suatu kabupaten/kota relative terhadap kabupaten/kota acuan dapat berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

1.3 Metode Penghitungan

Penghitungan IKK 2017 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK = \sum_{k=1}^n p_k q_k$$

dimana:

NK	: Nilai Komponen
p_k	: Harga material/upah/sewa alat ke-k
q_k	: Kuantitas/volume material/upah/sewa alat ke-k

Tahap penghitungan kedua adalah menghitung PPP system dengan menggunakan regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK = \alpha_i C_i + \beta_j P_j + \varepsilon$$

dimana:

NK	: Nilai Komponen
C_i	: <i>dummy</i> kabupaten/kota
P_j	: <i>dummy</i> komponen dalam suatu system
α_i dan β_j	: Koefisien regresi
PPP Sistem	: $\exp(\alpha_i)$

Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{bangunan} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{sistem_i} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kan/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (PPP_{bangunan})^{bobot} \right) \cdot 100$$

Paket Komoditas IKK

Pengertian paket komoditas IKK (*Basket of Construction Components/BoCC*) dalam hal ini adalah suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi. Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BoCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BoQ).

Pendekatan BoCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Bill of Quantity

Penghitungan IKK kabupaten/kota tahun 2016 ini menggunakan dua jenis penimbang, yakni *Bill of Quantity* dan diagram timbang IKK umum. *Bill of Quantity* kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas untuk masing-masing kelompok jenis bangunan.

Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu:

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- b. Jalan, jembatan, dan pelabuhan;
- c. Bangunan lainnya.

Berikut klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut:

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, kegiatan konstruksi yang termasuk dalam kelompok jenis bangunan ini adalah sebagai berikut:**
 1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.
 2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.
- b. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, kegiatan konstruksi yang masuk dalam kelompok jenis bangunan ini adalah:**
 1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 3. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/ pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- c. Bangunan lainnya, meliputi kegiatan pekerjaan umum untuk pertanian, instalasi listrik, gas, air minum, komunikasi, dan lainnya, diantaranya:**
 1. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 2. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
 3. Bangunan elektrik, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.

4. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
5. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
6. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
7. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih, air limbah, dan saluran drainase pada gedung.
8. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
9. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
10. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
11. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
12. Bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, penghitungan IKK seluruh kabupaten/kota dan provinsi menggunakan 5 (lima) kelompok jenis bangunan, yang antara lain:

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- b. Prasarana untuk pertanian;
- c. Jalan, jembatan, dan pelabuhan;
- d. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi;
- e. Bangunan lainnya.

Namun, sejak tahun 2005 hingga tahun 2016 penghitungan IKK hanya menggunakan 3 (tiga) kelompok jenis bangunan. Kelompok jenis bangunan yang tidak diikutsertakan adalah bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi, serta kelompok jenis bangunan sarana pertanian yang digabung dengan kelompok jenis bangunan lainnya.

Perubahan pengelompokan jenis bangunan ini dilakukan agar IKK antar kabupaten/kota yang dihasilkan lebih mempunyai keterbandingan/*comparable*. Kelompok jenis bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi tidak diikutsertakan, dikarenakan kualitas barang-barang dalam kelompok jenis bangunan tersebut sangat beragam antar kabupaten/kota. Sedangkan kelompok jenis bangunan sarana pertanian, tidak relevan lagi digunakan untuk daerah perkotaan.

Kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/jasa masing-masing kelompok jenis bangunan dapat berbeda antar kabupaten/kota. Data kuantitas/volume bahan bangunan tersebut diperoleh dari hasil studi pilot tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi.

Penghitungan Diagram Timbang

Diagram timbang umum IKK kabupaten/kota adalah bobot atau andil masing-masing kelompok jenis bangunan untuk menghitung IKK umum kabupaten/kota. Diagram timbang umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Data ini diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota atau provinsi. Untuk keperluan penghitungan IKK umum kabupaten/kota atau provinsi tahun 2015 menggunakan data Realisasi APBD tahun 2014.

Langkah awal yang dilakukan untuk menghitung penimbang IKK adalah mengumpulkan *Bill of Quantity* (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. BoQ yang dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 di kabupaten/kota yang bersangkutan. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Tahapan penghitungan diagram timbang dari data BoQ untuk masing-masing kabupaten-kota adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Data BoQ

Pengkodean merupakan langkah awal yang dilakukan dalam pengolahan data BoQ. Terdapat beberapa macam kode yang diberikan, diantaranya:

- a) Melakukan pengkodean jenis bangunan dan kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dokumen BoQ yang dikumpulkan.
- b) Melakukan pengkodean sistem pada setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ
- c) Melakukan pengkodean jenis komponen dari setiap uraian pekerjaan yang terdapat dalam BoQ.

Setiap uraian pekerjaan BoQ terdapat volume, harga, dan nilai dari beberapa bahan bangunan, tenaga kerja yang digunakan, dan sewa peralatan.

2. Menghitung masing-masing tahapan penimbang setiap kabupaten/kota

Penimbang untuk penghitungan IKK yang berasal dari data BoQ ada dua jenis penimbang yakni penimbang material dan penimbang sistem. Penimbang material digunakan untuk menghitung nilai komponen yaitu volume dari material, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi. Penimbang sistem digunakan untuk menghitung PPP bangunan yaitu *share* nilai sistem dari setiap sistem yang ada dalam suatu bangunan.

Selain dari data BoQ, penghitungan IKK 2017 juga menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009-2016. Penimbang realisasi APBD digunakan untuk tahap proyek.

Secara garis besar proses penghitungan IKK 2017 melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Mencari paket komoditas, klasifikasi komponen, dan diagram timbang material dari data BoQ
2. Menghitung nilai komponen yakni jumlah dari perkalian antara data harga hasil survei harga kemahalan konstruksi (VIKK) dengan diagram timbang material.
3. Melakukan regresi CPD dari keseluruhan nilai komponen setiap proyek, bangunan, dan sistem untuk memperoleh PPP sistem.

4. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP sistem dengan penimbang sistem setiap proyek dan bangunan untuk memperoleh PPP bangunan.
5. Melakukan rata-rata geometrik dari PPP bangunan untuk memperoleh PPP Proyek.
6. Melakukan rata-rata tertimbang geometrik antara PPP Proyek dengan rata-rata data realisasi APBD tahun 2009-2016 untuk memperoleh angka IKK.

Harga Jenis Bahan Bangunan/Sewa Alat dan Jasa

Data harga yang digunakan untuk penghitungan IKK Tahun 2015 adalah harga barang-barang konstruksi yang pada 4 (empat) tahapan, yakni periode bulan Juli dan Oktober 2014 serta Januari dan April 2015. Data harga tersebut dikumpulkan melalui survey serentak paket komoditas IKK yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Survei harga dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 30 di untuk setiap tahapan, yang setidaknya dikumpulkan dari 3 (tiga) pedagang besar barang/jasa konstruksi yang dianggap mewakili tingkat harga di pasaran.

Pada kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi sampel survei ini adalah UD Sahata, UD SHB, dan UD Rahmad. Responden yang dipilih dalam survei IKK di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 3 (tiga) toko ini dianggap telah mewakili kondisi harga pasar bahan konstruksi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, dikumpulkan pula data sewa alat berat dan jasa dari kontraktor ataupun dari instansi terkait yang menyediakan jasa sewa alat berat konstruksi. Responden untuk data ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

1.4 IKK 2016

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan

BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2017 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2016.

IKK tahun 2017 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2016, Oktober 2016, Januari 2017, dan April 2017. Seperti halnya IKK tahun 2016, IKK tahun 2017 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

<https://tapanulitengahkab.bps.go.id>

BAB II

PEMBAHASAN



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa penghitungan IKK mutlak dilakukan karena IKK digunakan sebagai salah satu komponen/penimbang dalam penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) tiap-tiap kabupaten/kota. Penghitungan IKK telah mempertimbangkan variasi harga-harga barang/jasa konstruksi yang beragam berdasarkan keadaan dan tingkat kesulitan geografis suatu wilayah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan merata. Demi pembagian DAU yang adil dan merata berdasarkan tingkat kesulitan letak geografis suatu wilayah tersebut, maka IKK hadir sebagai indeks spasial yang mutlak diperlukan.

Pada tahun-tahun sebelumnya hingga akhir 2009, Badan Pusat Statistik masih melakukan penghitungan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. IHPB ini sendiri dalam kaitannya dengan pembangunan suatu daerah berfungsi sebagai angka indeks yang dapat digunakan sebagai eskalasi (pertambahan dalam kuantitas/volum/jumlah) nilai proyek konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dapat didefinisikan sebagai angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah. IHPB termasuk dalam indeks periodikal sama seperti indeks harga konsumen (IHK), yakni angka indeks yang menggambarkan perkembangan harga di suatu lokasi pada periode tertentu terhadap harga tahun dasar.

Dalam perkembangannya, IHPB tidak lagi menjadi angka indeks yang wajib dihitung oleh seluruh kabupaten/kota. Hal ini dimungkinkan oleh ketersediaan proyek berskala besar dan nasional yang tidak sama/berbeda-beda dari seluruh kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota dengan nilai pembangunan dan kontrak yang besar tentunya memerlukan angka indeks ini sebagai acuan eskalasi nilai proyek yang harus diperhitungkan dan diprediksi. Atas dasar cakupan yang besar (42 jenis barang dan 4 sewa alat berat pada tahun 2008) menjadikan IHPB tidak lagi mutlak dihitung oleh seluruh kabupaten/kota. Berikut ditampilkan perbedaan IKK dan IHPB:

Tabel 2.1 Perbedaan IKK dan IHPB

No	IKK (<i>Spatial Index</i>)	No	IHPB (<i>Periodical Index</i>)
1.	Membandingkan harga untuk lokasi berbeda pada waktu yang sama	1.	Membandingkan harga untuk lokasi yang sama pada waktu yang berbeda
2.	<i>Reference</i> /dasar: rata-rata nasional	2.	<i>Reference</i> /dasar: tahun dasar
3.	Perbandingan harga antar wilayah	3.	Perubahan harga antar waktu
4.	Perbedaan struktur harga relatif besar	4.	Perubahan struktur harga relatif kecil
5.	<i>Comparability</i> dan <i>representative</i> sulit diperoleh	5.	<i>Comparability</i> dan <i>representative</i> mudah diperoleh

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IKK memberikan solusi atas perbedaan tingkat harga pada berbagai lokasi dalam waktu yang sama, sehingga nilai IKK seluruh kabupaten/kota telah memperhitungkan tingkat kesulitan geografis masing-masing wilayah pada saat yang bersamaan, walaupun keterbandingan dan keterwakilan komoditas barang sulit diperoleh. Hal ini disebabkan karena komoditas suatu barang di suatu daerah dengan kualitas dan kuantitas tertentu memang belum tentu dimiliki oleh daerah lain dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Pada penghitungan IKK untuk komoditas yang tidak ada di suatu daerah, tidak boleh membuat rujukan harga kabupaten/kota tetangga yang bersebelahan sebagai acuan harga barang dengan kualitas dan kuantitas yang sama dengan memperhitungkan ongkos/biaya transportasi yang diperlukan untuk mengangkut barang tersebut. Jadi yang menjadi acuan harga adalah semua komoditas yang ada beredar dan dijumpai di pasaran di suatu kabupaten/kota.

Tabel 2.2 berikut menyajikan perbandingan ruang lingkup, paket komoditas, serta kelompok jenis bangunan (diagram timbang) yang digunakan dalam penghitungan IKK dari tahun ke tahun (2008 – 2016).

Tabel 2.2 Perbandingan Antara IKK 2008 – IKK 2016

No.	KETERANGAN	Tahun								
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Ruang Lingkup: Jumlah Kabupaten/Kota	457	477	491	491	491	491	505	508	508
	Jumlah Provinsi	33	33	33	33	33	33	33	34	34
2.	Paket Komoditas: (jumlah barang dan sewa alat berat)	22	21	21	22	39	39	39	39	39
3.	Kelompok jenis bangunan	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat dilihat *trend* perkembangan jumlah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun yang tentunya juga disertai dengan penghitungan IKK untuk tiap-tiap kabupaten/kota dan provinsi. Tahun 2016 ruang lingkup penghitungan IKK mencakup 508 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

Penghitungan IKK pertama kali dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2002, yakni untuk memperoleh besaran angka IKK tahun 2004 dari 370 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Seiring dengan perkembangan tersebut, paket komoditas barang dan sewa alat berat juga mengalami perubahan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Jumlah paket komoditas barang dan sewa alat berat terbanyak yang dikumpulkan adalah pada tahun 2016, yakni sebanyak 39 jenis barang dan sewa alat berat. Sedangkan untuk kelompok jenis bangunan (diagram timbang) dari tahun 2005 hingga tahun 2016 konstan sebanyak 3 (tiga) jenis kelompok bangunan. Hanya tahun 2004 saja kelompok jenis bangunan yang digunakan sebagai diagram timbang sebanyak 5 (lima) kelompok/jenis.

2.2 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016

Hasil penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara di tahun 2015 dan 2016, dimana Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagai kota acuan di kedua tahun dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.3 IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan Kota Acuan Tahun 2015 dan 2016

Kabupaten / Provinsi	Indeks Umum	
	2015	2016
Tapanuli Tengah	98,08	96,56
Sumatera Utara	102,54	102,76
Kota Acuan	100,00*	100,00*

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan 2016

Catatan:

*) Kota Surabaya

Indeks Kemahalan Konstruksi umum Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2016 adalah sebesar 96,56, lebih rendah 6,20 poin jika dibandingkan dengan IKK umum Provinsi Sumatera Utara (102,76), dan juga lebih rendah 3,44 poin dibandingkan dengan IKK Kota Surabaya sebagai kota acuan (100,00). IKK umum Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan Indeks Kemahalan Konstruksi ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa persentase tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Kota Surabaya pada tahun 2016 lebih rendah dibanding tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap Kota Surabaya di tahun 2015.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tapanuli Tengah di tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara dengan selisih sebesar 6,20 poin yang mungkin disebabkan beberapa hal, diantaranya:

1. Harga komoditi konstruksi terutama harga barang galian dasar yang lebih rendah. Bangunan konstruksi memerlukan berbagai macam jenis barang yang saling melengkapi mulai dari pasir, batu, batu-bata, kayu, besi, semen, kaca, pipa, seng, aspal dan sebagainya hingga ke penggunaan peralatan berat. Diantara barang-barang konstruksi tersebut beberapa diantaranya dapat dihasilkan di Tapanuli Tengah sendiri tanpa harus didatangkan dari luar kabupaten, seperti pasir, batu dan kayu. Harga

komoditas lokal tersebut tercatat relatif lebih murah dibandingkan harga rata-rata produk sejenis di Provinsi Sumatera Utara.

2. Upah tenaga kerja konstruksi yang lebih rendah.
3. Letak geografis Kabupaten Tapanuli Tengah yang lebih mudah untuk mendatangkan komoditi konstruksi dari provinsi lain, misalnya Sumatera Barat.

Berikut disajikan besaran IKK umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Semarang sebagai kota acuan di tahun 2015 dan 2016 dalam visualisasi diagram batang.

Grafik 2.1 IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Acuan Tahun 2015-2016



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan 2016

Berdasarkan Grafik 2.1 di atas, terlihat bahwa di tahun 2015 IKK umum Kabupaten Tapanuli Tengah lebih rendah dari pada Kota Surabaya yang adalah kota acuan IKK dengan selisih sebesar 1,92 poin. Sama halnya pada tahun 2016 dimana IKK umum Kabupaten Tapanuli Tengah lebih rendah dari kota acuan IKK dengan selisih sebesar 3,44 poin. Hal ini diinterpretasikan bahwa untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas di Kabupaten

Tapanuli Tengah masih lebih murah dibandingkan dengan membangun satu unit bangunan di Kota Surabaya di tahun 2015 dan 2016. Dari tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015, membangun satu unit bangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah 1,02 kali lebih murah dan di tahun 2016 1,04 kali lebih murah dibanding Kota Surabaya.

IKK umum tertinggi pada tahun 2016 di Provinsi Sumatera Utara, dimiliki oleh Kabupaten Samosir yakni sebesar 109,53, dan terendah di Kota Binjai yakni sebesar 92,05 dengan *range* antara IKK umum tertinggi dan terendah di Provinsi Sumatera Utara sebesar 17,48. Hal ini menggambarkan tingkat kemahalan harga bangunan dari suatu nilai bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Samosir 1,19 kali lebih mahal jika dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kota Binjai.

Penyebab IKK Kabupaten Binjai lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara karena kondisi geografisnya yang baik sehingga memungkinkan jangkauan transportasi ke manapun, sedangkan Kabupaten Samosir dari sisi kondisi geografis kurang mendukung kelancaran akses terhadap penyediaan bahan-bahan kelompok bangunan secara umum, meskipun untuk komoditas tertentu kabupaten ini memproduksi sendiri. Kesulitan dalam pendistribusian barang konstruksi menyebabkan ongkos dan harga jual meningkat, sehingga angka indeks yang dihasilkan cenderung menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang lebih mudah dalam hal akses transportasi. Berikut disajikan besaran IKK kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara berikut peringkatnya dalam provinsi pada tahun 2016:

Tabel 2.4 IKK Kabupaten/Kota di Sumatera Utara serta Ranking dalam Provinsi Tahun 2015 dan 2016

Kabupaten/Kota		2015		2016	
		Indeks Umum	Ranking dalam Provinsi	Indeks Umum	Ranking dalam Provinsi
1	Nias	102,63	7	109,31	2
2	Mandailing Natal	91,54	24	102,62	14
3	Tapanuli Selatan	97,88	16	105,56	8
4	Tapanuli Tengah	98,08	15	96,56	26
5	Tapanuli Utara	97,47	19	94,48	28
6	Toba Samosir	97,66	17	101,53	15
7	Labuhan Batu	96,68	20	99,99	18

Kabupaten/Kota		2015		2016	
		Indeks Umum	Ranking dalam Provinsi	Indeks Umum	Ranking dalam Provinsi
8	Asahan	88,76	30	100,50	17
9	Simalungun	99,81	12	104,89	10
10	Dairi	100,44	9	105,97	7
11	Karo	99,39	13	104,20	11
12	Deli Serdang	99,18	14	105,99	6
13	Langkat	89,63	29	93,93	30
14	Nias Selatan	108,96	1	103,49	12
15	Humbang Hasundutan	90,22	27	94,30	29
16	Pakpak Bharat	95,45	21	97,00	25
17	Samosir	103,39	5	109,53	1
18	Serdang Bedagai	88,23	31	98,69	22
19	Batu Bara	90,26	26	95,68	27
20	Padang Lawas Utara	100,32	2	100,83	16
21	Padang Lawas	100,13	3	108,43	3
22	Labuhan Batu Utara	97,63	10	92,84	32
23	Labuhan Batu Selatan	91,60	11	99,81	19
24	Nias Utara	108,39	23	104,93	9
25	Nias Barat	108,03	18	107,77	4
71	Sibolga	103,39	6	93,24	31
72	Tanjung Balai	87,96	32	99,44	20
73	Pematang Siantar	101,08	8	107,37	5
74	Tebing Tinggi	85,57	33	98,19	23
75	Medan	90,16	28	98,69	21
76	Binjai	92,55	22	92,05	33
77	Padang Sidempuan	90,44	25	97,90	24
78	Gunung Sitoli	106,47	4	103,31	13

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan 2016

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Samosir, Kabupaten Nias dan Kabupaten Padang Lawas merupakan 3 (tiga) kabupaten yang memiliki indeks terbesar masing-masing 109,53 poin, 109,31 poin, dan 108,43 poin. Kota Binkai, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kota Sibolga adalah 3 (tiga) kabupaten dengan nilai indeks terendah, masing-masing 92,05 poin, 92,84 poin, dan 93,24 poin.

Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2016 menempati peringkat tertinggi ke-26 (lima belas) dengan besaran IKK 96,56. Secara umum, angka IKK ini menunjukkan bahwa jika

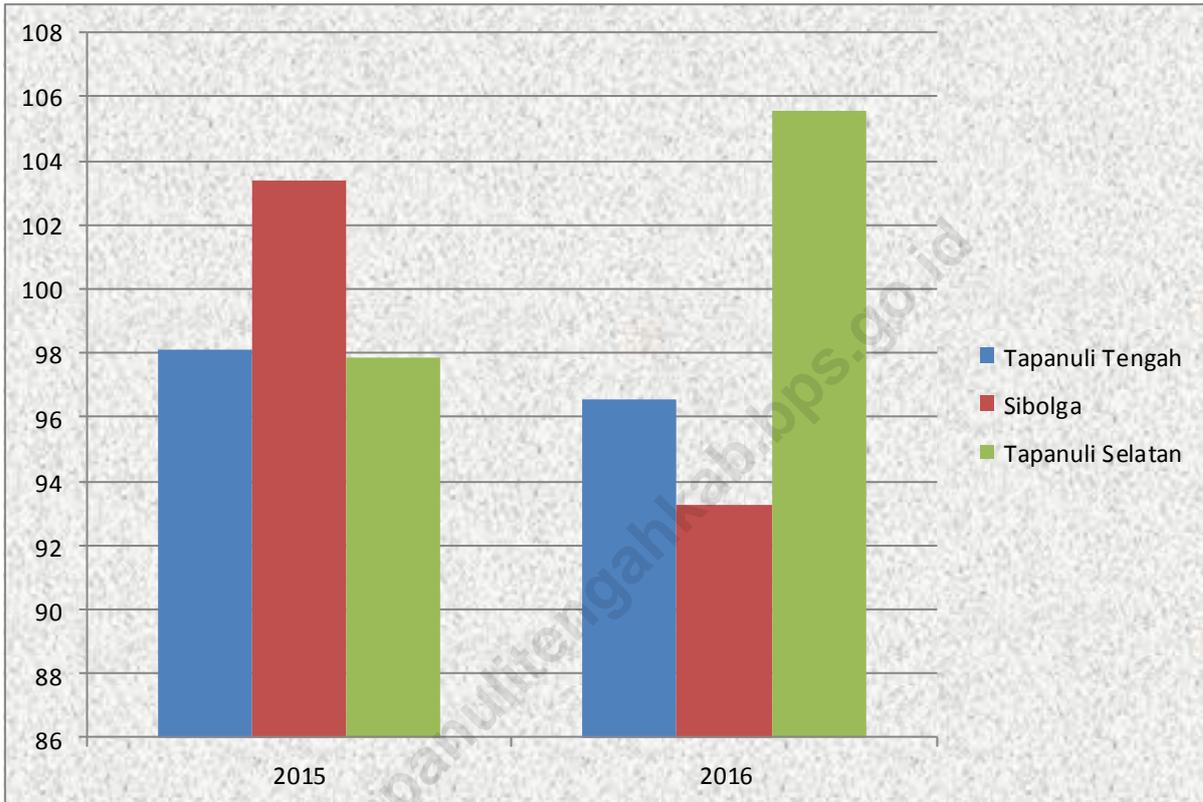
dibandingkan biaya untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di 33(tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, maka membangun di Kabupaten Tapanuli Tengah menduduki peringkat ke-26 (lima belas) termahal atau peringkat ke-7 (tujuh) termurah. Semakin tinggi poin IKK suatu kabupaten, maka semakin mahal biaya yang diperlukan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di kabupaten tersebut.

Jika dibandingkan dengan Kota Sibolga, nilai IKK Kabupaten Tapanuli Tengah lebih tinggi 3,32 poin. Dari tabel 2.4 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kemahalan harga bangunan dari suatu nilai bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Tapanuli Tengah 1,04 kali lebih mahal jika dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kota Sibolga. Walaupun jarak antara Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak jauh, namun Kota Sibolga memiliki pemasaran konstruksi yang lebih baik, sehingga bahan bangunan dasar menjadi lebih murah jika dibandingkan dengan harga di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berbeda dengan Kota Sibolga, IKK Kabupaten Tapanuli Selatan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan indeks 105,56 poin. Dari tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa untuk membangun 1 (satu) unit bangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah 1,09 kali lebih murah dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berikut disajikan grafik nilai IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan tahun 2015-2016:

Grafik 2.2 Perbandingan Nilai IKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015-2016



Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015

2.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 sebesar 102,76 poin. Jika dibandingkan dengan IKK provinsi acuan, Provinsi Jawa Timur lebih rendah dengan selisih 0,98 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga bangunan/biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Provinsi Sumatera Utara 1.01 kali lebih mahal dibandingkan dengan membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan luas di Provinsi Jawa Timur. Berikut disajikan tabel Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi di Indonesia pada tahun 2016:

Tabel 2.5 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi di Indonesia Tahun 2016

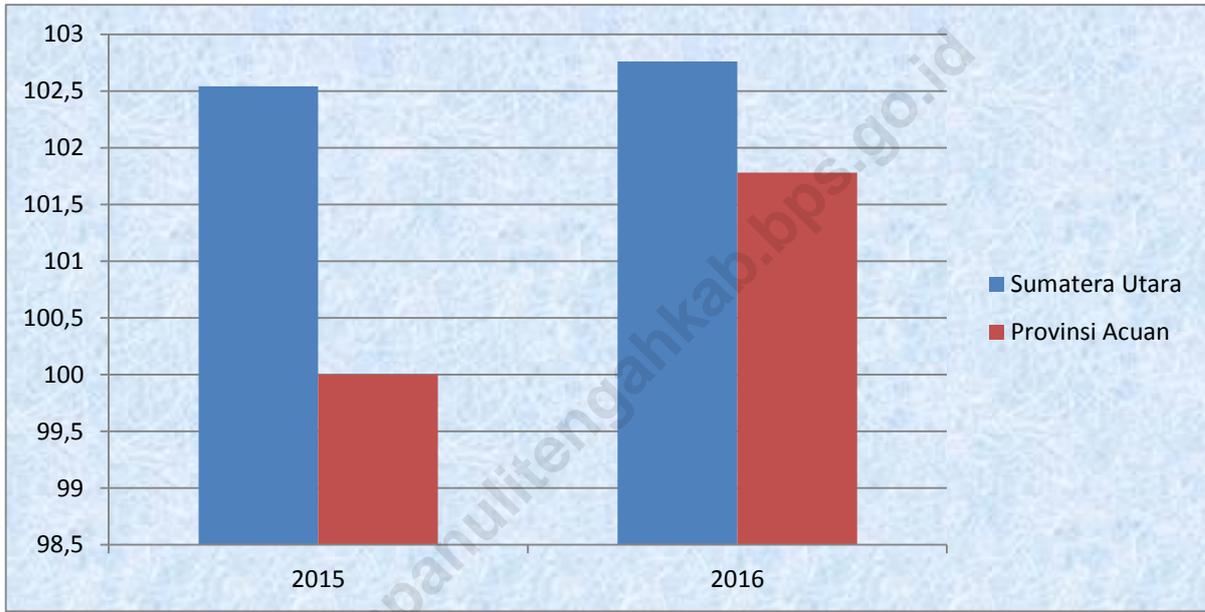
NO	KODE	PROVINSI	IKK*	RANKING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	11	NANGROE ACEH DARUSSALAM	100,14	26
2	12	SUMATERA UTARA	102,76	21
3	13	SUMATERA BARAT	103,69	17
4	14	RIAU	103,49	20
5	15	JAMBI	97,99	32
6	16	SUMATERA SELATAN	106,15	15
7	17	BENGKULU	101,86	23
8	18	LAMPUNG	99,40	29
9	19	BANGKA BELITUNG	107,64	13
10	21	KEPULAUAN RIAU	125,89	5
11	31	DKI JAKARTA	112,48	10
12	32	JAWA BARAT	103,79	16
13	33	JAWA TENGAH	98,96	30
14	34	DI YOGYAKARTA	100,65	25
15	35	JAWA TIMUR	101,78	24
16	36	BANTEN	103,66	18
17	51	BALI	113,32	9
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	93,70	34
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	99,82	27
20	61	KALIMANTAN BARAT	117,91	7
21	62	KALIMANTAN TENGAH	106,95	14
22	63	KALIMANTAN SELATAN	103,55	19
23	64	KALIMANTAN TIMUR	117,60	8
24	65	KALIMANTAN UTARA	127,99	3
25	71	SULAWESA UTARA	111,62	11
26	72	SULAWESI TENGAH	95,63	33
27	73	SULAWESI SELATAN	99,11	28
28	74	SULAWESI TENGGARA	107,98	12
29	75	GORONTALO	101,96	22
30	76	SULAWESI BARAT	98,39	31
31	81	MALUKU	121,76	6
32	82	MALUKU UTARA	127,99	3
33	91	PAPUA BARAT	1146,46	2
34	94	PAPUA	239,98	1

Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017

Jika dilihat dari tabel diatas, maka 3 (tiga) provinsi yang mewakili indeks terbesar adalah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara dengan indeks

masing-masing 239,98 poin, 146,46 poin, dan 127,99 poin. Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Jambi merupakan 3 (tiga) provinsi dengan angka indeks terendah dengan nilai masing-masing 93,70 poin, 95,63 poin, dan 97,99 poin. Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat ke-21 (dua puluh satu) tertinggi dari 34 provinsi.

Grafik 2.3 IKK Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Acuan Tahun 2015-2016



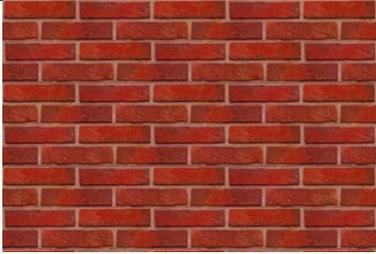
Sumber: Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015

Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan IKK dari tahun 2015 sebesar 102,54 poin dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi acuan, dan tahun 2016 sebesar 102,76 poin dengan Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi acuan. Secara sederhana, peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai kecenderungan peningkatan harga barang-barang konstruksi selama kurun waktu 2015-2016 di Provinsi Sumatera Utara.

LAMPIRAN 1



Lampiran 1. Gambar Bahan Bangunan dan Alat Berat Konstruksi yang Digunakan Sebagai Paket Komoditas Penghitungan IKK 2016

Jenis Barang	Gambar	Keterangan
Pasir Pasang		
Batu Kali Utuh/Belah		
Batu Bata		
Batako		

<p>Batu Split</p>		
<p>Semen Abu-abu</p>		
<p>Keramik Polos</p>		
<p>Kayu Papan</p>		
<p>Kayu Balok</p>		

<p>Kayu Lapis</p>		
<p>Cat Tembok</p>		
<p>Cat Kayu/Besi</p>		
<p>Besi Beton</p>		
<p>Seng Plat</p>		

<p>Seng Gelombang</p>		
<p>Kaca Bening</p>		
<p>Pipa PVC</p>		
<p>Aspal</p>		
<p><i>Excavator</i></p>		

<p><i>Buldozer</i></p>		
<p><i>Three Wheel roller</i></p>		
<p><i>Dump Truck</i></p>		

LAMPIRAN

2



Lampiran 2. Kuesioner yang Digunakan dalam Pencacahan IKK 2016

VIKK 2017



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**SURVEI SERENTAK HARGA BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI
SEWA ALAT BERAT, DAN UPAH JASA KONSTRUKSI
DALAM RANGKA PENGHITUNGAN IKK
PERIODE : JANUARI 2017**

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan data harga material, dan produk yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan buku pedoman.
2. Responden adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran), atau pedagang eceran.
3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari pengganti yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
5. Spesifikasi/kualitas barang setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas barang yang lama maka akan dicari pengganti yang setara.
6. Isian kuesioner dipindahkan ke komputer menggunakan program data entri dari BPS RI. Hasil entri dikirim ke shpb@bps.go.id dengan cc ke BPS Provinsi masing-masing.
7. Dilarang mengubah format file program data entri yang dikirim oleh SHPB.
8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas pencacah dan pemeriksa disimpan di BPS Kabupaten/Kota untuk digunakan pada saat rekonstruksi di BPS Provinsi.

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT	
1. Provinsi	Sumatera Utara
2. Kabupaten / Kota	Tapanuli Tengah
	1 2
	0 4

BLOK II : KETERANGAN PENCACAH			
1. Nama Pencacah		6. Nama Pengawas	
2. N I P Pencacah		7. N I P Pengawas	
3. Tanggal Pencacahan	4. Selesai Dianti Tanggal	8. Tanggal Pengawasan	
5. Tanda Tangan Pencacah		9. Tanda Tangan Pengawas	

BLOK III : DATA HARGA MATERIAL

Jenis Barang	Kualitas Barang	Kode	KODE RESP	KODE MERK	KODE MERK	KODE GABUNG	Responden	Satuan Standar	Merk	Satuan (batu, rak, bambu, rd, dll)	Ukuran Satuan setempat			Konversi satuan setempat ke satuan standar	Harga per satuan setempat (Rp)	Harga per satuan standar (Rp)	Nama responden (jika memungkinkan)	Keeterangan (merk lainnya, ukuran lainnya, dll)	
											Ukuran Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)						
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tanah Urug	Basa						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Pasir	Pasir Pasang (pasir laut, pasir kali)						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Pasir	Pasir Beton / Cor (pasir gunung)						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batu Pondasi	Batu Kali Belah						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batu Bata	Batu bata tanah liat (bata merah)						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batako	Batako berlubang (hollow block)						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batako	Batako tidak berlubang (solid block)						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Bata Ringan	Cellcon atau Hebel						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batu Split	Ukuran 1 - 2 cm						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batu Split	Ukuran 2 - 3 cm						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											
Batu Split	Ukuran 3 - 4 cm						I	m ³											
							II	m ³											
							III	m ³											

Tangki Air Fiber	Ukuran 350-450 liter																			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X									
1. PENGLIN 2. PROFIL 3. EXCEL 4. PENYU 5. GRAND	Ukuran 500-650 liter	II	buah																	
	Ukuran 1000-1100 liter	III	buah																	
	Ukuran 2000-2200 liter	I	buah																	
		II	buah																	
		III	buah																	
Lampu 1. PHILIPS 2. HANNOCS 3. CHRYOA 4. OSRAM 5. SHINYOKU	Lampu pijar 25 W	II	buah																	
	Lampu pijar 40 W	III	buah																	
	Lampu TL panjang 18-20 W	I	buah																	
	Lampu SL (TL pendek) 18 W	II	buah																	
		III	buah																	
Lampu 1. PHILIPS 2. HANNOCS 3. CHRYOA 4. OSRAM 5. SHINYOKU	Lampu SL (TL pendek) 20 W	I	buah																	
		II	buah																	
		III	buah																	
		I	buah																	
		II	buah																	
MGB (SPLN. 108-1993)	1 Phasa 4 Ampere	III	buah																	
		I	buah																	
		II	buah																	
		III	buah																	
		I	buah																	
1. SCHNEIDER 2. JERUMI GERIN 3. BRICO 4. SHUKAKU 5. HANNOCS	1 Phasa 6 Ampere	II	buah																	
		III	buah																	
		I	buah																	
		II	buah																	
		III	buah																	
	I	buah																		

PEJELASAN PENGISIAN BLOK III	
<p>TAMU LUBUNG PASIR, BATU PONDASI, BATU SPLIT</p> <p>Satuan standar untuk barang-barang ini adalah m³. Jika harga yang diperoleh sudah dalam m³ maka isi kolom 7, 8, 9 dengan angka 1 dan isikan harga per m³ pada kolom 12. Jika satuan percahahan tidak standar (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, dan tinggi bak yang berisi kemudian harga yang dicadai per satuan isi pada kolom 12.</p> <p>BATU BATA, BATZKO</p> <p>Isikan ukuran batu bata/batako per buah yaitu: panjang, lebar, dan tinggi dalam meter kemudian tulis harga batu bata per buah pada kolom 12.</p> <p>SEMEN PORTLAND, CEMENTUS</p> <p>Pilih ketiga barang ini berdasarkan peringkat merek. Isikan merek pada kolom 5, berat per kemasannya di kolom 10, dan harga per kemasannya pada kolom 12.</p> <p>BESI, BETON, PPA, PVC</p> <p>Untuk PPA, PVC, dan beton maracahi sesuai dengan peringkat merek. Isikan panjang PPA, PVC atau BESI, BETON pada kolom 7 kemudian harga per batangnya pada kolom 12.</p> <p>KAYU BALOK, KAYU BAPAN</p> <p>Tuliskan jenis kayu pada kolom 5. Satuan standar kayu balok atau kayu papan adalah m³. Jika percahahan barang itu sudah dalam satuan m³ maka isikan kolom 7, 8, 9 dengan angka 1 kemudian isikan harga per m³ pada kolom 12. Jika kayu per lembar maka isikan panjang, lebar, dan tinggi kayu pada kolom 7-9. Isikan harga kayu per lembar pada kolom 12. Jika kayu per ton maka isikan kolom 11 dengan angka konversi dari ton ke m³ (1ton=...m³), sedangkan kolom 7-9 dikosongkan. Harga yang dicadai pada kolom 12 adalah harga kayu per ton.</p>	<p>KACA, GYPSUM</p> <p>Uraikan maracahi sesuai dengan peringkat merek. Tuliskan merek pada kolom 5 kemudian isikan panjang dan lebar kaca/gysum per meter (dalam meter) pada kolom 7, 8. Tuliskan harga kaca/gysum per meter pada kolom 12.</p> <p>KABEL</p> <p>Satuan standar kabel adalah meter. Jika kabel dijual per meter maka isikan kolom 7 dengan angka 1 dan tuliskan harga kabel per meter pada kolom 12. Jika kabel dijual per rol maka isikan panjangnya pada kolom 7 kemudian tuliskan harga kabel per rol pada kolom 12.</p>
PENEGASAN PECAHAHAN IKK	
<p>1. PECAHAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL (PASIR, BATU PONDASI, BATU SPLIT, BATU BATA, BATZKO, KUSEN) DIPEROLEHKAN DARI PRODUSEN YANG TIDAK BERADA DI BUKOTA KABUPATEN TAPANULI.</p> <p>2. PECAHAHAN HARGA UNTUK BARANG-BARANG NATURAL TIDAK HARUS READY STOCK.</p> <p>3. UNTUK PECAHAHAN IKK TRIMULAN IV TAHUN 2014, TRIMULAN TAHUN 2015 DAN TRIMULAN BERKUTIPNYA, PENILIHAN KUALITAS SPESIFIKASI BARANG HARUS SMA.</p> <p>4. UNTUK SEMUA ALAT BERAT PADA BLOK 4, DI KOLON KETERANGAN TULISKAN APAKAH HARGA SEMUA MERUPAKAN HASIL KONVERSI ATAU TIDAK.</p>	

BLOK IV : DATA SEWA ALAT BERAT DAN UPAH PEKERJA KONSTRUKSI

Jenis Barang	Kode	Kualitas Barang	Responden	Satuan/unit (001) 1 BULAN (002) 200 JAM	Nilai sewa per satuan/unit (Rp)	Nama Responden	Keterangan
(1)	(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Excavator PC-200	4442600001011001	Kapasitas bucket 0,8 m ³	I	002 200 JAM			
	4442600001012001		II	002 200 JAM			
	4442600001013001		III	002 200 JAM			
Excavator PC-200	4442600001011002	Kapasitas bucket 0,6 m ³	I	002 200 JAM			
	4442600001012002		II	002 200 JAM			
	4442600001013002		III	002 200 JAM			
Excavator PC-200	4442600001011003	Kapasitas bucket 0,4 m ³	I				
	4442600001012003		II				
	4442600001013003		III				
Buldozer D-65	4442100001011001	Universal Blade (U-Blade)	I	002 200 JAM			
	4442100001012001		II	002 200 JAM			
	4442100001013001		III	002 200 JAM			
Buldozer D-65	4442100001011002	Straight Blade (S-Blade)	I				
	4442100001012002		II				
	4442100001013002		III				
Buldozer D-65	4442100001011005	Bowl Dozer	I	002 200 JAM			
	4442100001012005		II				
	4442100001013005		III				
Loader (V/wheel atau Track)	4442300001011001	Kapasitas bucket 0,8 m ³	I	002 200 JAM			
	4442300001012001		II				
	4442300001013001		III				
Loader (V/wheel atau Track)	4442300001011002	Kapasitas bucket 0,6 m ³	I	002 200 JAM			
	4442300001012002		II	002 200 JAM			
	4442300001013002		III	002 200 JAM			
Loader (V/wheel atau Track)	4442300001011003	Kapasitas bucket 0,4 m ³	I	002 200 JAM			
	4442300001012003		II	002 200 JAM			
	4442300001013003		III	002 200 JAM			
Tandem/Vibrating Roller	4442400001011001	8 - 10 ton	I				
	4442400001012001		II				
	4442400001013001		III				
Tandem/Vibrating Roller	4442400001011002	Kurang dari 8 ton	I	002 200 JAM			
	4442400001012002		II	002 200 JAM			
	4442400001013002		III	002 200 JAM			
Dump Truck	4442801000011001	Kapasitas 20 ton (tronton)	I				
	4442801000012001		II				
	4442801000013001		III				
Dump Truck	4442801000011002	Kapasitas 12 ton (engkel)	I	002 200 JAM			
	4442801000012002		II	002 200 JAM			
	4442801000013002		III	002 200 JAM			
Dump Truck	4442801000011003	Kapasitas 8 ton (colt dieseel)	I	002 200 JAM			
	4442801000012003		II				
	4442801000013003		III				

Motor Grader	4442201000011001	< 100 HP	I						
	4442201000012001		II	002	200 JAM				
	4442201000013001		III	002	200 JAM				
	4442201000011002		I	001	1 BULAN				
Asphalt Finisher	4442201000013002	> 100 HP	II						
	4442901000011001		I						
	4442901000012001		II	002	200 JAM				
Generator set	4442901000013001	20 KVA	III	002	200 JAM				
	4611301001011001		I						
	4611301001012001		II	002	200 JAM				
	4611301001013001		III	002	200 JAM				
	4611301001011002		I						
	4611301001012002		II						
	4611301001013002		III						
	4611301001011003		I						
	4611301001012003		II						
	4611301001013003		III						
	JASA KONSTRUKSI								
	Upah Kepala Tukang		600000200001100		I	O-H			
600000200001200		II	O-H						
600000200001300		III	O-H						
Upah Tukang Batu	600000300001100		I	O-H					
	600000300001200		II	O-H					
	600000300001300		III	O-H					
Upah Tukang Kayu	600000300003100		I	O-H					
	600000300003200		II	O-H					
	600000300003300		III	O-H					
Upah Instalatir Listrik	600000600001100		I	Titik/OH					
	600000600001200		II	Titik/OH					
	600000600001300		III	Titik/OH					
Upah Pembantu Tukang	600000700001100		I	O-H					
	600000700001200		II	O-H					
	600000700001300		III	O-H					

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

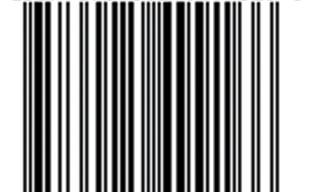
<https://tapanulitengahkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Jl. N. Daulay, Pandan, Sumatera Utara 22611
Telp:(0631) 371082, Fax: (0631) 372066
Homepage: <http://tapanulitengahkab.bps.go.id>
E-mail: bps1204@bps.go.id

ISBN 978-602-549-916-6



9 786025 499166 >